

## Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Pemerintah Sudah Berupaya

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram perihal proses pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrrens, yang hingga saat ini belum dibebaskan. Jokowi mengatakan, pemerintah tidak pernah diam dan selalu berupaya untuk membebaskan Pilot Susi Air tersebut.

"Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat. Tetapi, tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/7).

Jokowi mengungkapkan, tadi malam dirinya menggelar rapat dengan kementerian dan lembaga terkait proses pembebasan Pilot Susi Air. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan apa-apa saja isi rapat yang dibahas.

"Tadi malam pun kita sudah rapat juga, enggak bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa. Tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus, tapi tidak bisa kita buka kepada publik," kata Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan akan mengutamakan menyelamatkan nyawa dalam pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrrens.

"Kita lebih kepada kemanusiaan kan enggak ada harganya. Enggak bisa dihargai seberapa pun, apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia, baik itu keselamatan pilot maupun masyarakat yang berada di sekitarnya," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7) lalu. ● han

## KPU Pastikan 4 Juta Pemilih Baru Usia 17 Tahun Berhak Nyoblos 2024

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemuka adanya 4 juta pemilih berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. Hal itu disebabkan para pemilih itu belum memiliki e-KTP.

"Bawaslu melakukan pencermatan pemilih potensial nonKTP-el berdasarkan lampiran berita acara (BA) KPU di tingkat provinsi sebanyak 4.005.275," ujar Plh Ketua Bawaslu RI Lolly Suheni, dalam keterangannya dilihat, Jumat (7/7).

"Adanya pemilih non-KTP-el tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya syarat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, sebagaimana pasal Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," katanya menjelaskan.

Sebanyak 4 juta pemilih itu rata-rata mereka yang baru berusia 17 tahun, tepat pada 14 Februari 2024. Selain itu, ada pula pemilih yang sudah berusia 17 tahun dan belum memiliki perekaman e-KTP.

Komisariat Pemilihan Umum (KPU) memastikan, sebanyak 4 juta pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat meng-

gunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. KPU memastikan mereka tetap potensial memilih meski belum memiliki e-KTP pada 14 Februari 2024.

"Di DP4 itu sudah ada. Makanya DP4 itu kepenjangan adalah daftar penduduk potensial pemilih untuk Pemilu 2024. Masih potensial dan namanya sudah ada," ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi Betty Epsilon Idroos.

Setiap anak yang lahir telah memiliki NIK. Dia mengatakan pemilih yang baru berusia 17 tahun pada 14 Februari 2024 akan otomatis masuk ke DPT. "Sepanjang anak itu punya NIK, karena setiap anak yang lahir pasti punya NIK, kalau sudah 17 tahun pada 14 Februari 2024 maka datanya sudah ketarik, masuklah ke DPT kita," jelasnya.

"Misalnya anak yang baru mendapatkan identitas, bisa saja, tapi kan tidak kehilangan hak pilih. DPK masih ada," ujarnya.

Meski belum e-KTP, Betty memastikan mereka dapat memilih menggunakan Kartu Keluarga (KK). Dia menyebut yang akan ditunjukkan saat memilih ialah NIK. ● mei

# 2 | Polhukam



### PRABOWO BUKA RAKERNAS PSBI 2023

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) menerima pemakaian ulos oleh Ketua Umum PSBI Effendi MS Simbolon (kiri) usai membuka kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) 2023 di Jakarta, Jumat (7/7). PSBI merupakan organisasi masyarakat yang berbasis kekerabatan marga Simbolon yang dibentuk untuk melestarikan warisan nilai-nilai masyarakat adat Batak.

## Belum Juga Tangkap, Harun Masiku Ganti Paspas atau Operasi Wajah?

KPK pernah kena frank terkait keberadaan buronan Harun Masiku di luar negeri. Setelah dicek, ternyata orang yang dimaksud bukan Harun Masiku.

### JAKARTA (IM) - Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku, hingga kini belum juga tertangkap. Mungkinkah eks politisi PDI-P itu menggunakan paspor palsu atau melakukan operasi wajah?

KPK masih terus memburu Harun Masiku, tersangka suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Nama Harun Masiku sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 29 Januari 2020. Namun hingga sekarang, belum diketahui

keberadaannya. Ia hilang bak ditelan bumi.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak memiliki kendala administrasi dalam memburu Harun karena red notice dari Interpol sudah terbit. Meski demikian, KPK masih menghadapi kemungkinan Harun Masiku berganti identitas atau paspor.

"Nah itu memang apa namanya, menjadi, ya kita, apa namanya, berpacu dengan itu

(ganti paspor)," ujar Asep kepada wartawan, Jumat (7/7).

Dalam perburuan Harun Masiku, KPK pun pernah kena frank. KPK dapat informasi bulan lalu bahwa Harun Masiku berada di suatu tempat di luar negeri. Namun, setelah dicek, ternyata orang yang dimaksud bukan Harun Masiku.

KPK ingin secepatnya menangkap Harun Masiku karena sudah terlalu lama buron. "Sebetulnya targetnya itu secepatnya, saya tuh ingin kalau ada misalkan ada informasi yang AI, besok kita berangkat gitu," kata Asep Guntur saat dikonfirmasi, Jumat (7/7).

Asep memastikan bahwa lembaga antirasuah tidak pernah menunda-nunda untuk menangkap Harun Masiku. Perburuan terhadap Harun

terus dilakukan, hanya saja, belum ada informasi yang valid soal keberadaan buronan tersebut.

"Kita tidak pernah menunda-nunda gitu, karena, kalau ada orangnya seperti misalkan Izil Azhar, ada orangnya dan ada informasi itu kita datang ke sana dengan segala macam risiko," ujar Asep.

Sekadar informasi, Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif (caleg) asal PDI Perjuangan (PDIP) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulsaan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR.

Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Ketiganya yakni, mantan Komisioner Komisi

Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan; mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; serta pihak swasta, Saeful.

Harun Masiku sendiri berhasil lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dia berhasil melarikan diri saat tim KPK hendak menangkapnya. Dia kemudian ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020. Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Bahkan, Harun telah ditetapkan sebagai buronan internasional. KPK telah meminta Interpol untuk menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku. Kendati demikian, hingga kini belum diketahui keberadaan Harun Masiku. ● han



### MEMERIKSAAN STEFANUS ROY RENING

Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening (tengah) berjalan ke ruangan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/7). Stefanus Roy Rening diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan perintangannya penyidikan dalam kasus suap proyek infrastruktur di Papua yang melibatkan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.

## Hubungan PDI-P dan PD Berlanjut Usai Pertemuan Puan dan AHY

JAKARTA (IM) - Hubungan PDI Perjuangan (PDIP) DENGAN Partai Demokrat (PD) semakin membaik usai pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kini hubungan kedua parpol itu disebut terus berlanjut. Puan beserta jajaran PDI-P melakukan pertemuan dengan AHY di Plataran Senayan pada Minggu (18/6). Dalam pertemuan itu ada ungkapan rekonsiliasi kedua partai.

Pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu disebut Puan berlangsung hangat. Keduanya juga sempat makan bubur bersama. "Kalau kemudian ngobrolnya antara ketua umum sama ketua DPR kayaknya nggak satu jam lebih tapi 20 menit ya udah selesai, karena ngomongnya serius pastinya. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol sekalian bersantap bubur, buburnya enak sekali," kata Puan.

Pertemuan ini, kata Puan, tentunya dinanti-nantikan oleh berbagai pihak. Puan menyebut dia dan AHY berbicara mengenai politik dan cara

membangun bangsa. "Pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan bukan cuma oleh media, oleh kami juga bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis tapi ada sebelumnya, sesudahnya dan pascanya itu mau seperti apa," ucap Puan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, hubungan PDIP dan PD saat ini tengah cair. Hubungan pun disebut terus berlanjut sampai saat ini usai pertemuan Puan dan AHY. "Terus dilanjut pertemuan. Artinya kita menjadi cair sekali," ujar Hasto di Kantor Rumah Aspirasi, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Bahkan kata Hasto, pihaknya dengan Demokrat terus berdialog. Diskusi yang cair antara kedua partai ini juga terjadi di tingkat fraksi DPR. Hasto menyambut suasana ini. Dia menilai suasananya dengan Demokrat kini positif untuk langkah ke depan. "Sehingga enak untuk terus mendialogkan. Ini merupakan energi yang positif jadi langkah-langkah ke depan," tuturnya. ● mei

## Soal Klaim Pengembalian Rp27 Miliar, Kejagung Bakal Periksa Maqdir Ismail

JAKARTA (IM) - Pengacara terdakwa Irwan Hermawan, Maqdir Ismail, dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait klaim pengembalian uang Rp27 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) dari seorang pihak swasta.

Maqdir mengatakan ingin mengembalikan uang tersebut kepada Kejagung pada Selasa (4/7). Namun hingga saat ini, Kejagung menyatakan belum menerima uang tersebut.

"Mengenai pernyataan Maqdir Ismail pengacara Irwan Hermawan bahwa adanya orang yaitu pihak swasta yang mengembalikan uang senilai Rp27 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Maka dari itu, tim penyidik Kejaksaan Agung akan melakukan pemeriksaan," kata Maqdir.

Maqdir Ismail untuk menjelaskan terkait pernyataan yang bersangkutan," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Jumat (7/7).

Dalam pemeriksaan, tim penyidik bakal meminta keterangan kepada Maqdir dan membawa uang senilai Rp27 miliar sebagaimana pernyataannya di media.

"Agar membuat terang perkara yang saat ini sedang dalam proses penyidikan dan bergulir di persidangan terkait dengan aliran dana," ujarnya.

Pemanggilan Maqdir terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020 sampai 2022.

Sebelumnya, Maqdir Ismail setelah menjalani sidang mengklaim akan ada seseorang yang mengembalikan uang Rp27 miliar ke Irwan. Maqdir menyinggung soal

orang yang menjanjikan penghentian perkara kasus korupsi BTS Kominfo.

"Sepanjang yang saya dengar, ada yang menjanjikan bisa menghapus perkara ini untuk menghentikannya," katanya.

Maqdir enggan menyebutkan siapa yang mengembalikan uang tersebut. Maqdir mengatakan uang yang diterima dari seseorang itu akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung.

"Ya yang ada-ada, tetapi saya tidak bisa memastikan dia Markus atau bukan," kata Maqdir.

"Sekarang sudah akan diserahkan ke kejaksaan. Rencananya hari ini," imbuhnya.

Maqdir mengatakan uang Rp27 miliar yang diserahkan itu dalam bentuk tunai. Uang itu berbentuk mata uang asing.

"Ya (Rp 27 miliar). Uang cash. Mata uang asing," ucap Maqdir. ● mei

## PDIP Siap Buka Pintu Buat PKB untuk Gabung Dukong Ganjar Pranowo

JAKARTA (IM) - PDI Perjuangan akan membuka pintu lebar untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jika ingin bergabung mendukung Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sekjen DPP PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan hal ini saat disinggung pertemuannya antara fraksinya dengan Fraksi PKB beberapa waktu lalu.

"Jadi bukan hanya keinginan dari PKB (bertemu dengan PDIP), dari PDIP aktif mengulurkan tangannya untuk bekerja sama dengan PKB," kata Hasto di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta, Kamis (6/7).

Dia melanjutkan, komunikasi terus dilakukan lewat para kader PDIP yang diberikan tugas seperti Puan Maharani hingga Said Abdullah. Ter-

lebih, PDIP memiliki hubungan sejarah dengan PKB.

"Ya kalau kita kerja sama sama PKB kan sudah berlangsung cukup lama, bukan hal yang baru. Kita merasakan bagaimana semangat juang sejak tahun 2014 bahu-membahu di dalam memenangkan Pak Jokowi dan itu sudah menjadi hubungan yang sifatnya substansial," ujarnya.

Dia menyatakan bahwa partainya tetap menghormati posisi PKB yang kini masih berkoalisi dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Kita juga hormati mengingat PKB sebelumnya sudah membangun kerja sama dengan partai Gerindra karena kepemimpinan pak Ganjar itu sama dengan kepemimpinan pak Jokowi, menyatukan, bukan kepemimpinan yang membelah," katanya. ● mei

## Hadir di Rakernas Punguan Simbolon, Prabowo Duduk Bareng Effendi Simbolon

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Marga Simbolon. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh jajaran anggota Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia (PSBI).

Pantauan di Hotel Arya Duta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/7), Prabowo tiba sekitar pukul 10.29 WIB. Ia mengenakan kemeja berwarna putih dengan celana berwarna hitam.

Prabowo sempat menyalami sejumlah pengurus PSBI, sebelum masuk ke ruangan tempat acara dilakukan. Prabowo pun sempat berfoto dengan panitia PSBI.

Ia kemudian bersalaman dengan anggota PSBI yang ada di lokasi, kemudian berjalan ke dalam lokasi acara bersama Ketua Umum PSBI, Effendi Simbolon. Di dalam lokasi acara, Prabowo duduk sejajar dengan Effendi Simbolon, yang juga merupakan anggota Komisi I DPR RI dan kader PDIP.

Di lokasi acara terlihat juga

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule. Iwan Bule tampak mengenakan batik berwarna cokelat. "Selamat datang Pak Menhan Prabowo Subianto, salam horas dari kami," kata pembawa acara.

Untuk diketahui, PSBI merupakan organisasi masyarakat yang berbasis kekerabatan marga Simbolon. PSBI diketuai langsung oleh Effendi Simbolon yang diputuskan dalam Kongres I, Juli 2007.

Organisasi ini dibentuk untuk melestarikan warisan nilai-nilai masyarakat adat Batak. Mereka bertekad untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun kegiatan PSBI yang selama ini dilakukan di antaranya membantu warga dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Mereka juga mengadakan beberapa acara seperti, Kongres Nasional PSBI, Rakernas PSBI, Musyawarah Masyarakat Adat Batak (MMAB), hingga PSBI Peduli. ● mei



### PERTEMUAN MENPORA-KETUM PSSI

Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri) bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kemenpora, Jakarta, Jumat (7/7). Pertemuan tersebut membahas penyelenggaraan Piala Dunia U-17.